

STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PADI DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PADI DI RIAU

Oleh

Gevisioner, Tengku Harunur Rasyid, Subkhan Riza, Syarifah Lia Susana, Rizky Rahmawati, Desi Suryanti Alam, Ronny Bowo Leksono, Desy Hairani.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program peningkatan produksi padi masih menjadi program utama pemerintah provinsi Riau sampai saat ini melalui kegiatan Riau Bertani, karena beras masih merupakan makanan pokok di provinsi Riau. Riau Bertani telah terlaksana sejak tahun 2020. Produksi padi di Provinsi Riau pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan 2,54 % setiap tahunnya. Produksi padi pada tahun 2022 mencapai 213.557 ton, atau masih dibawah target yakni 313.213 ton (DPTPH Riau, 2023). Beberapa faktor penghambat peningkatan produksi padi tersebut antara lain oleh berkurangnya lahan yang siap tanam baik regular maupun Indeks Pertanaman (IP), kondisi jaringan irigasi 28 % bekinerja sedang dan 72 % kinerja rusak. Dalam rangka percepatan pencapaian target produksi padi pada tahun 2024 sesuai sasaran RIAU BERTANI, dan mendukung kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, perlu dirumuskan alternatif arah kebijakan yang lebih baik dalam peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani padi. Strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan produksi padi di Riau melalui : 1) Percepatan program Riau Bertani melalui upaya : a) penangkaran padi in-situ, b) peningkatan produktivitas melalui teknologi budidaya ramah lingkungan, c) peningkatan IP pada sawah kering dengan penggunaan padi gogo dan perluasan areal tanam, d) Peningkatan kinerja irigasi, 2) Peningkatan Aksesibilitas Beras dan Diversifikasi Pangan Sumber Karbohidrat Non-Beras.

PENDAHULUAN

Sampai hingga sekarang beras masih merupakan makanan pokok di provinsi Riau, sehingga program peningkatan produksi beras masih menjadi program utama pemerintah provinsi Riau sampai saat ini. Hal ini disebabkan semakin terbatasnya daerah produksi padi dan dilain pihak konsumsi beras semakin bertambah seiring dengan semakin bertambahnya penduduk, sehingga kesenjangan (gap) antara produksi dan konsumsi akan semakin melebar.

Menghadapi hal tersebut salah satu prioritas pembangunan Provinsi Riau dalam RPJMD 2019-2024 adalah program Riau bergerak tanam Padi atau yang dikenal RIAU BERTANI (Pemerintah Provinsi Riau, 2022). Program ini bertujuan untuk mewujudkan pertanian Riau yang Maju, Mandiri dan Modern dengan target 50% beras yang dikonsumsi masyarakat Riau merupakan hasil produksi sendiri (DPTPH, 2020).

RIAU BERTANI yang merupakan strategi peningkatan produksi padi

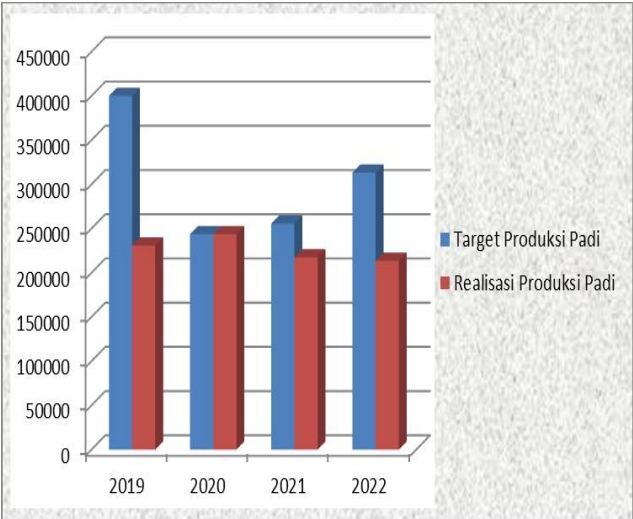
diinisiasi pada tanggal 26 Agustus 2020, dengan sasaran: 1) Peningkatan Produktivitas dari 3,66 Ton/Ha menjadi 4,1 Ton/Ha, 2) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 ke IP 200, dengan potensi 48.369 Ha, 3) Penerapan Mekanisasi melalui teknologi budidaya dan mutu hasil, 4) Penguatan Kelembagaan, berupa transformasi Poktan/Gapoktan 37 Klaster (DPTPH Riau, 2023).

Luas lahan pertanian di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian tahun 2019 adalah sebesar 62.684 Ha, namun terdapat perbedaan antara data tersebut dengan Ketetapan Luas Sawah Baku Berdasarkan Data Aplikasi PDPS Kementerian Pertanian RI tahun 2021 yang sebesar 73.726 ha, sementara indikasi dilapangan menunjukan bahwa luas lahan pertanian Provinsi Riau menurun dari tahun ketahun (Pemerintah Provinsi Riau, 2022).

Produksi padi di Provinsi Riau pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan 2,54 % setiap tahunnya (Gambar 1).

Produksi padi pada tahun 2022 berdasarkan KSA BPS mencapai 213.557 ton, atau masih dibawah target yakni 313.213 ton (DPTPH Riau, 2023). Beberapa faktor penghambat peningkatan produksi padi tersebut disebabkan antara lain oleh a) Berkurangnya lahan yang siap tanam baik regular maupun Indeks Pertanaman (IP) akibat kondisi jaringan irigasi tidak optimal, dimana kewenangan provinsi 28 % bekinerja sedang dan 72 % kinerja rusak. Kondisi infrastruktur tersebut menyebabkan biaya produksi padi menjadi tinggi terutama pada sentra produksi padi seperti di Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti dan Bengkalis.

Kondisi lahan pertanian yang tidak didukung dengan kondisi irigasi yang baik akan mempercepat terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan kepada perkebunan atau diluar sektor pertanian (Waheb, 2015).



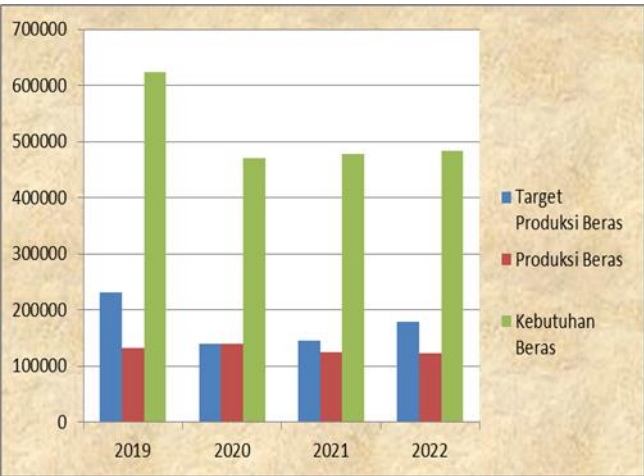
Gambar 1. Target dan Realisasi Produksi Padi (Ton) di Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2022

Penurunan produksi padi sebesar 2,54 % setiap tahunnya (Gambar 2) menyebabkan penurunan produksi beras di Riau, yang berdampak semakin berkurangnya kontribusi produksi padi dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Dengan kata lain kesenjangan antara produksi dan kebutuhan beras semakin besar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat dipasok dari daerah lain, terutama

Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya serta Malaysia.

Terdapat 36 merk dagang beras yang terdapat di Provinsi Riau. Merk dagang beras tersebut mempunyai harga yang berbeda-beda mulai dari harga kurang Rp.10.000/kg dan lebih dari Rp. 14.000/kg. Konsumsi beras di Provinsi Riau pada tahun 2018 mencapai 89,04 kg/kapita/tahun. Kondisi konsumsi beras penduduk Riau bila dibandingkan dengan konsumsi beras tingkat Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa konsumsi rata-rata beras Riau relatif paling rendah. Konsumsi beras nasional yang mencapai 97,11 kg/kapita/tahun. Bila angka konsumsi beras rata-rata provinsi Riau ini dibandingkan dengan konsumsi beras di provinsi di pulau Sumatera, konsumsi beras per kapita di Provinsi Riau paling kecil, dibanding Sumatera Utara (112,8 kg/kapita/tahun), Sumatera Barat (102,5 kg/kapita/tahun) dan Jambi (92,1 kg/kapita/tahun)((Gevisioner, dkk, 2021).

Dalam rangka percepatan pencapaian target produksi padi pada tahun 2024 sesuai sasaran RIAU BERTANI, dan mendukung kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, perlu dirumuskan alternatif arah kebijakan yang lebih baik dalam peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani padi.



Gambar 2. Target dan Realisasi Produksi Padi (Ton) di Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2022

Penurunan produksi beras di Provinsi Riau, juga berdampak kepada penurunan kesejahteraan petani pangan. Dari perkembangan data produksi beras dan nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan petani, diperoleh gambaran bahwa penurunan produksi beras memberikan fenomena turunya kesejahteraan petani pangan (Gambar 3). Dalam usahatani padi, terlihat bahwa faktor modal lebih tinggi pengaruhnya dalam meningkatkan produksi maupun pendapatan petani padi, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan tersebut, dapat diupayakan dengan penyediaan modal usaha bagi petani (Maulana, 2014).



Gambar 3. Target dan Realisasi Produksi Padi (Ton) di Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2022

METODOLOGI

Penyusunan *policy brief* ini diawali dengan dilakukan kajian. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Lingkup kajian Provinsi Riau, dilakukan di Pekanbaru, dari bulan Maret s/d Mei 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumentasi dari instansi terkait dengan tujuan kajian. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam memformulasikan kebijakan, dilakukan dengan beberapa tahap (a) Perumusan Masalah; (b) Agenda Kebijakan; (c) Pemilihan Alternatif Kebijakan (d)

Penetapan Kebijakan (Winarno, B, 2007 2015.)

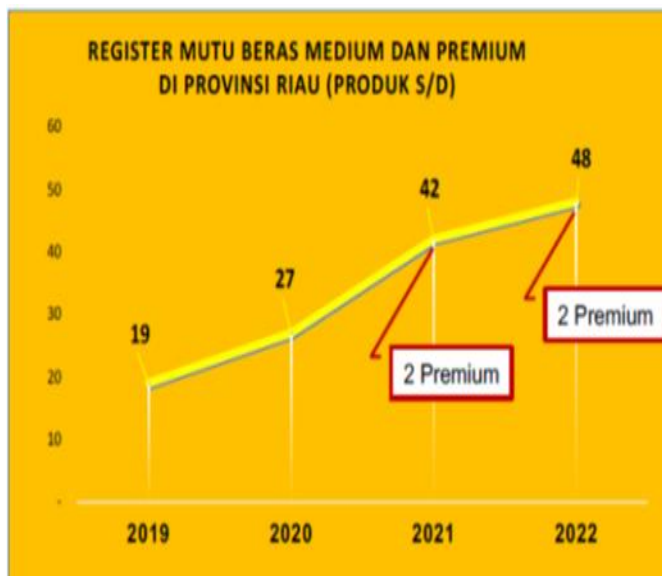
HASIL/TEMUAN

Kondisi pertanian khususnya padi di Provinsi Riau mengalami fluktuatif, produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2020 namun menurun kembali pada tahun 2021 dan 2022. Namun program RIAU BERTANI telah menunjukkan capaian yang baik, yakni meningkatnya produktivitas (Gambar 4), IP 200, produktivitas benih, mutu beras, pemanfaatan alsintan dan korporasi.



Gambar 4. Target dan Realisasi Produktivitas Padi (Ton/Ha) di Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2022.

Peningkatan produktivitas didorong oleh penggunaan benih padi unggul dan juga penggunaan alat mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen untuk peningkatan mutu hasil. Pada tahun 2021 penangkaran benih padi sudah mampu menghasilkan 834,45 Ton dimana terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 dimana menghasilkan 673,30 Ton. Pengadaan alat mesin pertanian juga mengalami peningkatan dari 75 unit di tahun 2020 menjadi 215 unit di tahun 2021. Register mutu beras medium dan premium mengalami peningkatan secara signifikan (Gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan Register Mutu Beras Medium dan Premium di Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2022.

Sedangkan faktor penguat pelaksanaan RIAU BERTANI adalah 1) Produksi benih unggul 2019-2022 mencapai 2.432,4 Ton melalui penangkaran in-situ, 2) Penggunaan benih unggul dan pupuk melalui program bantuan (padi intensifikasi, padi ekstensifikasi, penangkaran, padi rawa, padi lahan kering, padi biofortifikasi dan benih hibrida), bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, kelembagaan korporasi petani (Kemitraan BUMD/BUMDes dan Pembiayaan), 3) Potensi peningkatan IP dan Padi Gogo (Pelepasan 6 varietas padi gogo spesifik lokal Riau).

Khusus terkait masalah beras, yang tidak bisa ditunda konsumsinya perlu dijamin baik ketersediaaan (*available*) maupun kemampuan untuk mengaksesnya (*adavorable*), agar masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan ketika terjadi goncangan (Septiadi, dkk, 2016). Berdasarkan analisis kondisi tersebut diatas, dirumuskan 2 (dua) alternatif kebijakan peningkatan produksi padi dalam mewujudkan kesejahteraan petani padi di Provinsi Riau, yakni

1. Percepatan Program RIAU BERTANI

Pelaksanaan program Riau Bertani perlu dilakukan percepatan, selain tetap

pada konsisten pada sasaran yang telah ditetapkan yakni :

- Peningkatan Produktivitas dengan penggunaan bibit unggul, penangkaran benih dan pengembangan varietas unggul baru lokal. Target peningkatan produktivitas adalah dari 3,7 ton/ha menjadi 4,4 ton/ha.
- Peningkatan IP200 melalui pengelolaan lahan dan air, pembenahan berbagai prasarana pertanian seperti irigasi, embung, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan. Target peningkatan indeks penanaman dari IP 100 menjadi IP 200 adalah 48.369 ha.
- Penerapan Mekanisasi pertanian dengan penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan) pada tahapan pra tanam, tanam dan panen, serta dengan mengaktifkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sehingga pengelolaan Alsintan dilakukan lebih baik dan professional. Target UPJA adalah 16 unit (Gambar 6).



Gambar 6. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan pada Program Riau Bertani

- Penguatan Kelembagaan dengan menata kelembagaan kelompok tani, dan Budan Usaha Milik Petani (BUMP), untuk mendukung penguatan kelembagaan maka ditetapkan 16 klaster pertanian dan 3 food estates.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam peningkatan produksi padi di Riau melalui program Riau Bertani adalah a) penangkaran padi in-situ, b) peningkatan produktivitas melalui teknologi budidaya ramah lingkungan, c) peningkatan IP pada



sawah kering dengan penggunaan padi gogo dan perluasan areal tanam, d) Peningkatan kinerja irigasi.

2. Peningkatan Aksesibilitas Beras dan Diversifikasi Pangan Sumber Karbohidrat Non-Beras.

Akses rumah tangga terhadap pangan khususnya beras di provinsi Riau, memiliki peran yang semakin strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga (Rahman, 2010). Kebijakan peningkatan akses rumah tangga terhadap beras diarahkan pada :

- Meningkatkan penyediaan pangan lokal beras dan non beras, melalui peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberian insentif harga bagi produsen pangan /petani, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil-hasilnya.
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan dan gizi seimbang, mengarah kepada penganekaragaman (diversifikasi) pangan lokal,
- Penguatan kelembagaan, antara lain dengan membuka kesempatan dan mempermudah jalan bagi kelembagaan lokal baik di provinsi hingga desa. Seperti penguatan kelembagaan BUMD hingga BUMDES dalam penyediaan dan pendistribusian pangan.
- Menciptakan keterpaduan perancangan kebijakan ketahanan pangan baik keterpaduan antar kabupaten/ kota dalam provinsi serta antar pelaku (aparatur pemerintah, pelaku pasar, petani sebagai produsen, asosiasi profesi dan lembaga non pemerintah), mengingat sudah tersedianya Peraturan Daerah No.13 tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan, dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan fisik pada rumah tangga, masyarakat dan wilayah.
- Perbaikan infrastruktur, baik yang bersifat fisik ataupun pelayanan yang tidak mengarah pada biaya tinggi pada

proses distribusi beras dan komoditas pangan lainnya tidak dapat diproduksi secara optimal dari Provinsi Riau.

- Menyusun kesepakatan perdagangan bersama dengan daerah lain seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan

REKOMENDASI

Peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani padi dapat dilakukan melalui kebijakan dari hulu dan hilir dalam pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap beras yakni a) kebijakan percepatan pelaksanaan program Riau Bertani dan b) Peningkatan Aksesibilitas Beras dan Diversifikasi Pangan Sumber Karbohidrat Non-Beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau. 2020. Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pekanbaru.
- Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau. 2023. Evaluasi Pengembangan Tanaman Padi Provinsi Riau Tahun 2019-2022. Pekanbaru.
- Gevisioner, dkk. (2021). Household Accessibility to Staple Food and Factor Affecting in Riau Province, Indonesia. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol.17 No.6. <http://palarch.nl/index.php/jae/article/view/2924>
- Maulana, M. 2014. Peranan Luas Lahan, Intensitas Pertanaman dan Produktivitas Sebagai Sumber Pertumbuhan Padi Sawah di Indonesia 2000-2020. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 22 No.1, Mei 2014 : 74 - 95.
- Pemerintah Provinsi Riau. 2022. Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024. Pekanbaru
- Rahman, H. (2010). Aksesibilitas Pangan : Faktor Kunci Pencapaian Ketahanan Pangan di Indonesia. Pangan, 19(1), 147-156.
- Ritung, S dan Hidayat. (2007). Prospek Perluasan Lahan untuk Padi Sawah dan Padi Gogo di Indonesia. Jurnal Sumberdaya Lahan 1(4).
- Septiadi, D, Harianto, Suharno. (2016). Dampak Kebijakan Harga Beras dan Luas Areal Irigasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia. Vol 4. No.2, Desember 2016. Hal 91-106.



Policy Brief

Waheb, M. (2015). Pengaruh Luas Lahan, Produksi, Ketahanan Pangan dan Harga Gabah terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Kabupaten Pasuruan. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.7. No.1 Maret 2015. Hal 68-74.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.